

Globalisasi Ekonomi dan Stabilitas Makroekonomi di Pakistan: Analisis Kebijakan Moneter Konvensional dan Islam

**Mukhammad Gufron¹, Farhat Saleh Al Jufri², Sandi Natakusuma³, Mohammad
Ridwan⁴**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : gufronmukhammad94@gmail.com¹, farhat30saleh@gmail.com²,
sandinatakusuma09@gmail.com³, ridwanciperna@gmail.com⁴

Received: 2025-04-15; Accepted: 2025-04-20; Published: 2025-05-01

Abstract

Economic globalization has accelerated the interconnectedness of international markets, presenting both opportunities and significant challenges for developing countries such as Pakistan. As a Muslim country operating under a dual financial system (conventional and Islamic), globalization pressure affects its macroeconomic stability in a complex manner. This study aims to examine the impact of economic globalization on Pakistan's macroeconomic stability, analyze the monetary policy responses adopted, and explore the extent to which Islamic principles have been integrated into its macroeconomic policy. The study employs a qualitative descriptive approach using recent academic literature from the past five years. The findings show that while globalization fosters trade expansion and growth, it also increases vulnerability to exchange rate fluctuations, current account deficits, and imported inflation. Pakistan's monetary policy remains largely dominated by conventional interest-based instruments, with limited utilization of Islamic instruments such as sukuk and profit-sharing. This study recommends strengthening a hybrid Islamic monetary policy framework based on maqasid sharia to achieve long-term equitable economic stability.

Keywords: *Globalization, Monetary Policy, Islamic Economy, Macroeconomic Stability, Pakistan.*

Copyright © 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi modern, batas geografis antarnegara semakin memudar di ranah ekonomi. Globalisasi ekonomi telah menjadi pendorong utama integrasi pasar dunia, memfasilitasi pergerakan lintas negara yang cepat atas barang, jasa, modal, teknologi, dan sumber daya manusia. Negara-negara, baik maju maupun berkembang, terjalin dalam jaringan ekonomi global yang kompleks. Dalam sistem ini, kinerja ekonomi suatu negara sering kali dipengaruhi oleh dinamika global di luar kendali domestik, seperti perubahan harga komoditas internasional, fluktuasi nilai tukar, arus modal global, dan kebijakan moneter negara-negara adidaya, yang dapat secara langsung berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

Bagi negara-negara berkembang, globalisasi ekonomi di satu sisi menawarkan potensi besar. Keterbukaan perdagangan memungkinkan mereka memperluas pasar ekspor, memperbesar cadangan devisa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi asing, serta memperluas transfer teknologi dan pengetahuan manajerial dari negara maju (Khan & Khan, 2021). Dalam banyak kasus, globalisasi bahkan menjadi katalis bagi transformasi struktural ekonomi nasional, seperti penguatan industri manufaktur, pengembangan sektor jasa, serta peningkatan akses pasar keuangan global.

Namun demikian, di balik berbagai peluang yang ditawarkan, globalisasi juga membawa sejumlah tantangan dan risiko baru yang tidak ringan. Ketergantungan yang semakin dalam terhadap pasar internasional dapat meningkatkan kerentanan eksternal, terutama ketika negara berkembang menghadapi volatilitas harga komoditas global, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, hingga tekanan dari ketidakseimbangan neraca pembayaran. Selain itu, arus masuk dan keluar modal asing yang sangat cepat (*hot money*) sering kali menimbulkan instabilitas keuangan domestik. Ketergantungan impor bahan baku strategis, pangan, hingga energi juga membuat perekonomian nasional rentan terhadap gejolak harga dunia, sehingga menimbulkan ancaman inflasi impor yang sulit dikendalikan. Tidak jarang, ketidakseimbangan struktural ini memperbesar defisit transaksi berjalan, memperlemah cadangan devisa, serta menekan stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang (Ahmed & Iqbal, 2020; Aliyah & Indra, 2020).

Lebih jauh lagi, keterbukaan sektor keuangan nasional akibat globalisasi memperbesar eksposur perekonomian domestik terhadap krisis global yang sifatnya sistemik. Sejarah mencatat bagaimana krisis keuangan Asia 1997/1998, krisis subprime mortgage 2008, hingga pandemi COVID-19 pada 2020 mampu memicu guncangan makroekonomi yang dahsyat hampir di seluruh negara berkembang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam sistem ekonomi global saat ini, stabilitas makroekonomi nasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kebijakan domestik, melainkan juga oleh dinamika ekonomi dan keuangan global yang volatil dan penuh ketidakpastian.

Dalam konteks yang lebih spesifik, negara-negara Muslim menghadapi dilema tambahan dalam menyikapi globalisasi ekonomi tersebut. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia, Pakistan merupakan salah satu negara yang mengalami dilema akut antara mempertahankan kedaulatan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau menyesuaikan diri sepenuhnya dengan sistem moneter global yang berbasis bunga (*riba*). Sistem ekonomi Islam menolak bunga karena dipandang sebagai instrumen eksploitasi ekonomi, mendorong ketimpangan sosial, serta menciptakan instabilitas keuangan yang sistemik. Sebaliknya, sistem moneter konvensional berbasis suku bunga menjadi fondasi utama kebijakan moneter modern yang diadopsi oleh hampir seluruh negara dunia, termasuk Pakistan sejak awal kemerdekaannya.

Dalam dua dekade terakhir, muncul kesadaran yang semakin kuat di kalangan akademisi, ulama, maupun pembuat kebijakan di Pakistan untuk mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan makroekonominya. Sejumlah studi

menemukan bahwa penerapan sistem moneter syariah memiliki keunggulan teoretis dalam menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang karena menghindari praktek riba, mendorong keadilan distributif, menekan spekulasi, serta lebih berorientasi pada sektor riil. Prinsip maqasid syariah, yang menempatkan kemaslahatan publik (masalah) sebagai orientasi utama kebijakan, menawarkan model alternatif pengelolaan ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan (Amirullah & Yazid, 2024; Putri & Nasution, 2021; Qalbia & Saputra, 2023).

Akan tetapi, realitas di Pakistan menunjukkan bahwa upaya integrasi kebijakan moneter syariah tersebut masih berjalan secara parsial. Sistem moneter Pakistan hingga saat ini masih sangat dominan menggunakan instrumen konvensional berbasis suku bunga. Bank Sentral Pakistan (State Bank of Pakistan) secara umum masih menargetkan pengendalian inflasi melalui pengaturan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, serta manajemen nilai tukar yang fleksibel. Instrumen syariah seperti sukuk negara memang telah mulai diimplementasikan, tetapi volumenya masih sangat terbatas dalam komposisi total pembiayaan moneter negara. Di sisi lain, tekanan globalisasi justru semakin memperdalam eksposur Pakistan terhadap instrumen utang luar negeri berbunga, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral (Aziz, 2023).

Fenomena dualisme sistem keuangan ini menimbulkan perdebatan yang kompleks, baik di kalangan ekonom, regulator, maupun praktisi keuangan di Pakistan. Pada sisi tertentu, penguatan sektor perbankan syariah berjalan cukup pesat; namun pada sisi makro, penguatan kebijakan moneter syariah secara menyeluruh masih terkendala oleh sejumlah tantangan regulasi, politik, dan kapasitas kelembagaan.

Melihat dinamika tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana tekanan globalisasi ekonomi berdampak terhadap stabilitas makroekonomi Pakistan, sejauh mana kebijakan moneter konvensional mampu menjawab tantangan tersebut, serta bagaimana peluang integrasi prinsip-prinsip syariah dapat ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Pakistan di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka untuk menganalisis hubungan kompleks antara globalisasi, kebijakan moneter, dan penerapan prinsip syariah dalam konteks makroekonomi Pakistan. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya mengeksplorasi fenomena ekonomi secara mendalam dalam konteks naturalistik, menangkap dinamika makna sosial dan ekonomi yang muncul dari interaksi tekanan global dan prinsip ekonomi syariah (Sugiyono, 2015). Data primer bersumber dari artikel jurnal akademik internasional dan nasional (2019–2024) serta laporan resmi lembaga keuangan Islam, seperti Islamic Financial Services Board, yang relevan dengan topik globalisasi ekonomi, volatilitas nilai tukar, kebijakan moneter, dan instrumen syariah seperti sukuk dan perbankan syariah. Pemilihan data dilakukan melalui purposive sampling, mengelompokkan sumber berdasarkan tiga tema utama: pengaruh globalisasi terhadap

stabilitas makroekonomi, respons kebijakan moneter Pakistan, dan implementasi prinsip syariah dalam kebijakan makro. Analisis data menggunakan metode tematik, dengan tema-tema seperti volatilitas nilai tukar, defisit transaksi berjalan, inflasi impor global, dan mekanisme moneter syariah diolah secara induktif dan hermeneutis untuk membentuk narasi yang sistematis dan komprehensif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, membandingkan informasi dari jurnal, laporan keuangan, dan dokumen statistik lintas periode, sejalan dengan prinsip knihiman dalam studi pustaka. Pendekatan ini, yang menekankan reflektivitas dan adaptabilitas terhadap data (Yudin, 2020), memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman mendalam tentang dinamika ekonomi global dan nilai syariah, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti yang selaras dengan maqasid syariah dan tantangan global kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi dan Stabilitas Makroekonomi Pakistan

Globalisasi memberikan pengaruh ganda pada perekonomian Pakistan. Di satu sisi, globalisasi telah mendorong terbukanya akses ekspor Pakistan ke pasar Eropa, Timur Tengah, hingga Asia Timur. Menurut (Khan & Khan, 2021), Peningkatan ekspor terutama terjadi pada sektor tekstil, pertanian, serta jasa outsourcing. Pertumbuhan ekspor memberikan kontribusi positif pada PDB, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun di sisi lain, ketergantungan Pakistan terhadap impor bahan baku industri, energi, dan pangan menjadikan negara ini sangat rentan terhadap dinamika harga internasional. Fluktuasi harga minyak dunia, depresiasi mata uang rupee, serta peningkatan inflasi global secara signifikan memperburuk stabilitas harga domestik (Aliyah & Indra, 2020). Ketika harga minyak dunia naik, biaya produksi domestik pun meningkat sehingga mendorong harga konsumen naik.

Depresiasi nilai tukar rupee kerap terjadi akibat kombinasi faktor internal maupun eksternal. Volatilitas nilai tukar rupee sangat dipengaruhi oleh arus keluar investasi portofolio asing saat terjadi ketidakstabilan politik atau tekanan eksternal. Ketergantungan Pakistan pada utang luar negeri memperburuk posisi neraca pembayaran (Ahmed & Iqbal, 2020).

Lebih jauh, defisit transaksi berjalan Pakistan menjadi kronis karena ketidakseimbangan antara nilai ekspor dan impor. Meski ekspor meningkat, namun pertumbuhan impor jauh lebih cepat, terutama akibat ketergantungan pada bahan baku industri, mesin produksi, serta barang konsumsi impor.

Semua kondisi tersebut memicu tekanan inflasi yang cukup tinggi. Inflasi makanan dan energi menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga di Pakistan dalam dekade terakhir.

Inflasi ini sangat membebani masyarakat berpenghasilan rendah, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan berpotensi menimbulkan instabilitas sosial.

Respons Kebijakan Moneter Konvensional Pakistan

Menghadapi tekanan makroekonomi tersebut, Bank Sentral Pakistan (State Bank of Pakistan/SBP) menerapkan kebijakan moneter konvensional berbasis pengendalian suku bunga, pengelolaan cadangan devisa, serta intervensi di pasar valuta asing. Instrumen suku bunga acuan digunakan sebagai alat utama untuk mengontrol inflasi dan menjaga daya saing mata uang.

Kebijakan menaikkan suku bunga acuan terbukti mampu meredam depresiasi rupee dalam jangka pendek karena menarik masuk arus investasi portofolio asing. Namun kebijakan ini juga membawa dampak negatif, terutama memperbesar beban bunga utang pemerintah serta memperlambat kredit sektor riil (Aziz, 2023). Ketika suku bunga tinggi, dunia usaha mengurangi permintaan kredit, investasi produktif pun melambat. Kebijakan pengendalian likuiditas melalui operasi pasar terbuka juga dilakukan dengan menyerap eksekus likuiditas untuk menghindari tekanan inflasi. Namun sekali lagi, dampak ikutan berupa kontraksi pertumbuhan kredit kerap muncul.

Dalam jangka panjang, pengendalian moneter berbasis suku bunga berpotensi memunculkan paradoks kebijakan: di satu sisi menjaga stabilitas harga jangka pendek, namun memperlemah pertumbuhan ekonomi riil akibat minimnya ekspansi kredit produktif.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pendekatan ini dinilai kurang tepat karena tetap bergantung pada sistem bunga yang berlawanan dengan prinsip keuangan Islam yang mengharamkan riba.

Tantangan Integrasi Prinsip Moneter Syariah di Pakistan

Sebagai negara Muslim, Pakistan sejatinya memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem moneter Islam. Beberapa langkah awal telah dilakukan, seperti penerbitan sukuk negara sejak 2008 yang digunakan baik untuk pembiayaan defisit maupun pengendalian likuiditas (Qalbia & Saputra, 2023).

Namun implementasi sukuk negara Pakistan masih relatif kecil volumenya dibandingkan dengan instrumen obligasi konvensional. Tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Minimnya penguatan kerangka hukum moneter syariah: Meski sektor perbankan syariah berkembang, namun kerangka moneter syariah pada tingkat makro belum sepenuhnya diadopsi.

2. Keterbatasan instrumen moneter syariah: Profit-sharing instruments seperti mudharabah dan musyarakah kurang populer di tingkat makro, karena kompleksitas pengelolaan risiko dan pengawasannya.
3. Preferensi lembaga keuangan: Sebagian besar lembaga keuangan syariah di Pakistan masih dominan menggunakan akad murabahah (jual beli margin) yang lebih mirip dengan pembiayaan konvensional.
4. Kurangnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter: Implementasi instrumen syariah membutuhkan sinergi lintas otoritas untuk menjadikan kebijakan moneter syariah sebagai pilar utama.

Padahal secara konseptual, kebijakan moneter syariah mengedepankan stabilitas nilai riil, menghindari spekulasi, mendorong produktivitas sektor riil, serta memastikan pemerataan distribusi pendapatan (Amirullah & Yazid, 2024; Putri & Nasution, 2021). Jika kebijakan moneter syariah terintegrasi secara optimal, maka Pakistan dapat meminimalisasi ketergantungan pada instrumen utang berbunga, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi makro yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Globalisasi ekonomi membawa dampak campuran bagi perekonomian Pakistan. Meskipun terjadi peningkatan ekspor, pertumbuhan ekonomi, serta masuknya investasi asing, di sisi lain muncul tekanan makroekonomi berupa ketergantungan impor, depresiasi mata uang, defisit transaksi berjalan, hingga inflasi impor yang kronis. Dalam menghadapi tekanan globalisasi, kebijakan moneter Pakistan masih sangat konvensional dengan mengandalkan suku bunga acuan dan intervensi pasar valuta asing. Kebijakan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan akar masalah, bahkan cenderung memunculkan dilema pertumbuhan jangka panjang. Penerapan instrumen moneter syariah seperti sukuk dan profit-sharing di Pakistan masih bersifat terbatas dan memerlukan penguatan kelembagaan, regulasi, serta dukungan politik yang kuat. Penguatan prinsip maqasid syariah pada tingkat kebijakan makro diyakini dapat memperbaiki struktur ekonomi Pakistan menjadi lebih resilien, adil, dan stabil.

REFERENSI

- Ahmed, W., & Iqbal, J. (2020). Exchange Rate Volatility and Foreign Exchange Reserves: Evidence from Pakistan. *Global Business Review*, 21(6), 1520-1534. <https://doi.org/10.1177/0972150919880653>
- Aliyah, H., & Indra, I. (2020). Dampak globalisasi perdagangan terhadap tingkat kesejahteraan negara negara berpenduduk Muslim. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(1), 99–110. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.4764>

- Amirullah, S. H. A., & Yazid, M. (2024). Model kebijakan moneter Islam dalam menghadapi krisis ekonomi. *Jurnal Keislaman*, 8(1), 243–255. <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.394>
- Aziz, R. A. (2023). Kebijakan moneter di negara Islam dan negara Muslim: Iran, Pakistan, Saudi Arabia, dan Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 203–217.
- Khan, M. A., & Khan, M. (2021). Trade Liberalization, Economic Growth and Poverty Reduction in Pakistan. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 42(2), 1-26.
- Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2021). Kebijakan moneter dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Kebijakan moneter Islam: Landasan teoretis, implementasi, dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 3306. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.3306>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yudin. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Suatu pendekatan dasar*. Mataram: UIN Mataram Press.